PENGARUH REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CILEGON TAHUN 2014-2018

Sev Rahmiyanti¹, Didit Prasetyo²

Universitas Banten Jaya¹

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang²

Serang, Indonesia

sevrahmiyanti@unbaja.ac.id¹, diditacong@gmail.com²

ABSTRAK

This research was conducted to determine the effect of local taxes and levies on local revenue. This study uses data on the realization of the Regional Expenditure Budget and is devoted to the data on the realization of the revenue of the original region of Cilegon which was taken over a period of five years, starting from 2014 until 2018. The data was obtained from the Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Cilegon with the type of data used is time series data. The results of this study indicate the effect of local tax revenue and regional retribution in the city of Cilegon have a positive effect simultaneously on the increase of local revenue with a magnitude of influence of 94.8%, while partially local tax and regional levies have different influences in influencing local revenue. It can be concluded that regional taxes have a significant effect on local own-source revenues while regional user fees do not have a significant effect on regional own-source revenues.

Keywords: *regional taxes, levies and local own-source revenues.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah secara penuh adalah cita - cita semua daerah di Indonesia. Salah satu sumber keuangan yang diperoleh untuk kelanjutan cita - cita tersebut adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dapat dijadikan

salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam proses penyelenggaraan pemerintah di daerah. Setiap penyelenggaraan pemerintah daerah harus benar - benar menggali secara maksimal apa-apa yang menjadi sumber potensi sebagai sumber pendapatan tersebut. Sehingga, dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak mengalami ketertinggalan

dalam semua aspek terutama yang berhubungan dengan pembiayaan.

Tujuannya utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban - beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis.

Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat.

Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena salah satunya perlu kemampuan ekonomi yaitu; pertama adalah tentang

bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat, kedua bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah (Nugroho I, Dahuri, R 2004).

Mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonomyang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif

sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang penerimaan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah.

Untuk merealisasikan keinginan dalam menetapkan otonomi guna mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Maka Pemerintah Pusat telah menetapkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini mengisyaratkan diberlakukannya otonomi daerah, dimana pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun kota telah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri melalui otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan.

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah pendapatan asli daerah di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Pertumbuhan komponen pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah serta mendorong peningkatan kemampuan peranan perusahaan daerah untuk dapat memberikan kontribusinya kepada pendapatan asli daerah.

Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Sebutan lain bagi Kota Cilegon adalah Kota Baja mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon. Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital negara, antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading Habeam Centre, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, (Rencana Lot) Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan (Rencana Lot) Kawasan Industri Berikat Selat Sunda. Dengan banyaknya kegiatan

industri skala besar yang terdapat di Cilegon makaterdapat potensi untuk menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dalam kawasan Kota Cilegon.

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daraha adalah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari :

- (1) Pajak Propinsi, contoh; pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Pajak kabupaten/kota, contoh; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Pengertian Retribusi daerah dikemukakan oleh Mardiasmo. (2002 : 100), menyatakan bahwa yang dimaksud Retribusi daerah adalah “Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. Retribusi yang dipungut oleh pemerintah Indonesia sekarang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan objek sebagai berikut:

- 1) Jasa umum, yaitu jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 2) Jasa usaha, yaitu jasa yang menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 3) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan pmda dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan dalam menggali potensi sumber-sumber keuntungannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi rakyat.

Definisi Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun jenis Pendapatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 dikelompokkan atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Dana Perimbangan; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

H1: Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cilegon

H2: Pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cilegon

H3: Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cilegon

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012:7) merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen

penelitian, analisis bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2014), Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, bisa berbentuk catatan harian, foto, gambar, dan sejarah kehidupan. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan (annual report) pada situs resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon (<http://bpkad.cilegon.go.id/>).

Analisis data menurut Sunyoto (2013:24) analisis data terdiri dari:

1. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif merupakan analisis non statistik yang membantu dalam penelitian yang kemudian ditafsirkan dengan baik.

2. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan rumus-rumus statistik untuk perhitungan angka-angka dalam rangka menganalisis data yang diperoleh.

Untuk menjelaskan pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon, maka penulis menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan analisis deskriptif, uji normalitas, uji hipotesis.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi dan sampel Kota Cilegon. Data dalam penelitian ini bersumber laporan APBD Pemerintahan Kota Cilegon yakni data PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain yang diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon. Analisis

deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasinya.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variasi pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independent, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau *error* akan terdistribusi secara simetri disekitar nilai means sama dengan nol.

Untuk uji normalitas data, penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Apabila signifikasinya lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif keseluruhan variabel penelitian yang mencakup nilai minimum,

maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dibawah ini:
adalah seperti yang terlihat pada pada tabel

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	5	340,32	455,91	406,1240	43,50006
Hasil Retribusi Daerah	5	14,37	25,88	18,9630	4,51528
Pendapatan Asli Daerah	5	467,95	652,08	569,1220	65,79187
Valid N (Listwise)	5				

Sumber: Output SPSS

Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang di uji sebanyak 5. Selain itu diperoleh gambaran nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah sebagai variabel X_1

Penerimaan Pajak Daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2014 sampai 2018 yang menunjukkan penerimaan terbesar terdapat pada tahun 2017 sebesar Rp 455,91 miliar, sedangkan penerimaan terkecil terdapat pada tahun 2014 sebesar Rp. 340,32 miliar. Rata-rata penerimaan pajak daerah adalah sebesar Rp. 406,1240 miliar dengan standar deviasi Rp. 43,50006 miliar.

b. Retribusi Daerah sebagai variabel X_2

Penerimaan Hasil Retribusi Daerah waktu 5 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2014 sampai 2018, yang menunjukkan penerimaan terbesar terdapat pada Tahun 2016 sebesar Rp. 25,88 miliar, sedangkan penerimaan terkecil terdapat pada tahun 2014 sebesar Rp. 14,37miliar. Rata-rata penerimaan hasil retribusi daerah adalah sebesar Rp. 18,9630 miliyar dengan standar deviasi Rp. 4,51528 miliar.

c. Pendapatan Asli Daerah

Selama kurun 5 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat diketahui bahwa jumlah PAD terbesar terdapat pada Tahun 2017 sebesar Rp 652,08 miliar, sedangkan penerimaan terkecil terdapat pada Tahun 2014 sebesar Rp. 467,95 miliar. Rata-rata penerimaan PAD

adalah sebesar Rp. 569,1220 miliar, dengan standar deviasi Rp. 65,79187 miliar

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Hipotesis 1 (H1): Terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cilegon
- 2) Hipotesis 2 (H2): Terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cilegon
- 3) Hipotesis 3 (H3): Terdapat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cilegon

Pengujian didasarkan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Uji t
 - a) Jika nilai $\text{sig} < 0,05$, atau $t \text{ hitung} > t$ tabel maka terdapat pengaruh parsial variabel X terhadap variabel Y
 - b) Jika nilai $\text{sig} > 0,05$, atau $t \text{ hitung} < t$ tabel maka tidak terdapat pengaruh parsial variabel X terhadap variabel Y
- 2) Uji F
 - a) Jika nilai $\text{sig} < 0,05$, atau $F \text{ hitung} > F$ tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y
 - b) Jika nilai $\text{sig} > 0,05$, atau $F \text{ hitung} < F$ tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y

Uji Normalitas

Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji Statistik dengan kolomogorov-smirnov seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.	14,93918135
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	,281
	Positive	,151
	Negative	-,281
Test Statistic		,281
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS

Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai signifikansiyang dihasilkan dari uji normalitas dengan one sample kolomogorov-smirnovtest terhadap variable pajak daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah $0,200 > 0,05$ atau dapat dijabarkan bahwa signifikansi $0,200$ yang mana lebih besar dari $0,05$ (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual mempunyai distribusi

normal karena nilai signifikansinya diatas $0,05$ sehingga data tersebut layak dilanjutkan dengan uji asumsi klasik.

Uji Regresi Berganda

Hasil uji regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Variabel Terkait Pada Regresi Berganda
Variables Entered/Removed^{abh}

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Retribusi Daerah, Pajak Daerah ^b		. Enter

a. Dependent Variable: PAD

b. All requested variables entered.

Sumber: Output SPSS

Tabel 3 menunjukan variabel X_1 atau Pajak Daerah dan X_2 atau Retribusi Daerah yang menjadi variabel bebas, sedangkan

variabel Y atau Pendapatan Asli Daerah adalah variabel terikat.

Tabel 4. Hasil Korelasi Regresi Berganda

Model Summary				
Adjusted R				
Model	R	R Square	Square	Std. Error of the Estimate
1	,974 ^a	,948	,897	21,12719

a. Predictors: (Constant), Retribusi daerah, Pajak daerah

Sumber: Output SPSS

Tabel 4 menunjukkan Model Summary diperoleh nilai koefisien determinasi R Square = 0,948 yang berarti sekitar 94,8 % variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat menjelaskan variabel Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon. Nilai ini merupakan

nilai yang tinggi dan mencerminkan terjadinya hubungan kuat antara variabel bebas X_1 dan X_2 dan variabel terikat Y, dan nilai Adjusted R Square juga menunjukkan nilai yang tinggi yaitu 0,948.

Tabel 5. Perolehan Nilai Koefisien Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t Sig.
1	(Constant)	-50,225	106,355		-,472 ,683
	Pajak daerah	1,456	,243	,963	5,985 ,027
	Retribusi daerah	1,478	2,344	,101	,631 ,593

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS

Tabel 5 menunjukkan nilai koefisien/parameter regresi linear berganda diatas $a = -50,225$, $b_1 = 1,456$ dan $b_2 = 1,478$. Sehingga persamaan regresi yang diperoleh adalah : $Y = -50,225 + 1,456 X_1 + 1,478X_2$.

Uji t

Hasil uji t yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t Sig.
1	(Constant)	-50,225	106,355		-,472 ,683
	Pajak daerah	1,456	,243	,963	5,985 ,027
	Retribusi daerah	1,478	2,344	,101	,631 ,593

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS

Tabel 6 dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut, mana diantara variabel independent yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, taraf signifikansi $5\%:2=2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) = $n-k-1$ atau $5-2-1=2$ (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independent). Dengan pengujian 2 sisi (Signifikan = 0,025), maka hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar 4,303. Sehingga didapat hasil pengujian sebagai berikut:

- (1) Variabel pajak daerah memiliki t hitung sebesar 5,985 dengan taraf signifikansi 0,027 dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung > t tabel atau $5,985 > 4,303$.
- (2) Variabel retribusi daerah memiliki t hitung 0,631 dengan taraf signifikansi 0,593 diatas signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung < t tabel atau $0,693 < 4,303$.

Dari hasil perolehan uji t seperti pada tabel 6 dengan membandingkan t

hitung dengan t tabel pada kedua variabel bebas, yaitu nilai uji t pada variabel pajak daerah ($5,985 > 4,303$) dan retribusi daerah ($0,693 < 4,303$) maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel secara parsial memiliki pengaruh yang berbeda dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang berarti hipotesis 1 (H1) dapat diterima sedangkan Retribusi Daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berarti hipotesis 2 (H2) tidak dapat diterima.

Hasil uji F (fisher)

Hasil uji F yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16421,566	2	8210,783	18,395	,052 ^b
	Residual	892,717	2	446,358		
	Total	17314,282	4			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Retribusi daerah, Pajak daerah

Sumber: Output SPSS

Uji F dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut, apakah variabel independent secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependent. Uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, taraf signifikansi 5% (0,05) dengan rumus $F_{tabel} = F(k, n-k)$ atau $F(2, 3)$ (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independent). Dari pengujian tersebut maka hasil yang diperoleh untuk F tabel adalah sebesar 9,55. Dari tabel 7 menunjukan hasil uji F sebesar 18,395 dengan tingkat signifikansi 0,052 yang mana diatas signifikansi 0,05 (5%) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $18,395 > 9,55$.

Dari uji diatas didapat kesimpulan bahwa secara signifikansi $0,052 > 0,05$ namun secara perbandingan antara F hitung dan F tabel didapat $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $18,395 > 9,55$. Karena sudah memenuhi dasar pengambilan keputusan dalam uji F

yang mana disyaratkan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y maka dapat dikatakan bahwa hipotesis yang telah dikemukakan pada landasan teori, kedua variabel independent yaitu variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependent yaitu Pendapatan Asli Daerah. Maka hipotesis 3 (H3) yang dikemukakan dapat diterima.

Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh variabel bebas (X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Hasil Analisis Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,974 ^a	,948	,897	21,12719

a. Predictors: (Constant), Retribusi daerah, Pajak daerah

Sumber: Output SPSS

Tabel 8 dapat diketahui bahwa hasil Adjusted R Square adalah 0,948 atau 94,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 94,8% , sedangkan sisanya 5,2% (100%-94,8%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan.

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dijabarkan pada subbab sebelumnya. Dari hasil pengujian hipotesis dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji t, variabel pajak daerah mempunyai t hitung sebesar 5,985 dengan taraf signifikansi 0,027 dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $5,985 > 4,303$ sehingga disimpulkan bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah yang berarti hipotesis 1 (H1) dapat diterima yang

berarti semakin besar jumlah pajak daerah yang diterima maka akan semakin besar pula penerimaan pendapatan asli daerah Kota Cilegon. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Regina Usman (2016) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Berdasar uji t, variabel retribusi daerah memiliki t hitung 0,631 dengan taraf signifikansi 0,593 diatas signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $0,693 < 4,303$ sehinggaretribusi daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berarti hipotesis 2 (H2) tidak dapat diterimasehingga besar kecilnya penerimaan retribusi daerah belum tentu berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Cilegon. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Regina Usman (2016) dan Lakoy (2016) bahwa tidak ada

pengaruh yang signifikan dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

3. Berdasar uji F, perbandingan antara F hitung dan F tabel didapat $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $18,395 > 9,55$ sehingga variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependent yaitu Pendapatan Asli Daerah yang berarti hipotesis 3 (H3) yang dikemukakan dapat diterima dapat disimpulkan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Regina Usman (2016) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dari model regresi didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -50,225 + 1,456 X_1 + 1,478 X_2$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X₁ = Pajak Daerah

X₂ = Retribusi Daerah

Persamaan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta yang diperoleh adalah -50,225 menyatakan bahwa jika variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah bernilai nol, diasumsikan bahwa jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh sebesar -50,225.
2. Koefisien regresi pajak daerah bernilai positif 1,456 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan pajak daerah maka diperkirakan pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 1,456 dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai tetap.
3. Koefisien regresi retribusi daerah bernilai positif 1,478 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan retribusi daerah maka diperkirakan pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 1,478 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Tabel 9. Fluktuasi Komponen PAD Kota Cilegon Tahun 2014-2018

Tahun	Pajak Daerah (Milyar)	Fluktuasi	Retribusi Daerah (Milyar)	Fluktuasi	Pendapatan Asli Daerah (Milyar)	Fluktuasi
2014	340,32	-	14,37	-	467,95	-
2015	412,61	21%	20,125	40%	579,58	24%
2016	392,55	-5%	25,88	29%	567,66	-2%
2017	455,91	16%	15,61	-40%	652,08	15%
2018	429,23	-6%	18,83	21%	578,34	-11%

Dari hasil penelitian diketahui bahwa angka realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Cilegon mempunyai kecenderungan untuk berfluktuasi dan tidak stabil. Pertumbuhan realisasi penerimaan atas pajak daerah dan retribusi daerah yang bergerak naik turun tersebut juga berpengaruh pada realisasi atas Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel 8 dimana terjadi kenaikan pada tahun 2015 sebesar 24% dan tahun 2017 sebesar 15% namun mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar -2% dan tahun 2018 sebesar -11%. Kecenderungan berfluktuasi atas komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon ini disinyalir disebabkan oleh faktor dimana banyak sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum digali dan kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam

menggali sumber-sumber penerimaan yang ada.

Bila diamati lebih jauh terdapat persamaan dalam pola fluktuasi antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Kesamaan pola terlihat dimana mengalami kenaikan pada tahun yang sama yaitu tahun 2015 dan 2018 serta mengalami pola penurunan juga pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2018. Hal yang berbeda ditemukan pada pola fluktuasi retribusi daerah yang mempunyai tren kenaikan selama tahun 2015, 2016 dan 2018 yaitu sebesar 40%, 29%, dan 21%. Penurunan retribusi daerah dalam periode tahun 2014 sampai dengan 2018 hanya terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar -40%. Jika melihat data tersebut dimana terdapat kesamaan pola fluktuasi antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah serta data bahwa

retribusi daerah mempunyai pola fluktuasi yang berbeda dari komponen lainnya semakin menguatkan hasil penelitian ini yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan juga hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cilegon. Data-data yang menyangkut penelitian ini diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon. Sampel data yang diambil dalam penelitian ini data perolehan pendapatan asli daerah selama 5 Tahun(2014-2018).

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dibuktikan pada hasil nilai t hitung $5,985 >$ nilai t tabel $4,303$.
2. Hasil Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dibuktikan pada hasil t hitung $0,693 <$ nilai t tabel $4,303$.
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dibuktikan pada hasil uji F karena nilai F hitung $18,395 >$ F tabel $9,55$.

DAFTAR PUSTAKA

- Danang Sunyoto, (2011), *Parktik SPSS untuk Kasus, dilengkapi Contoh Penelitian Bidang Ekonomi*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Hasan, Iqbal. (2013), *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Indonesia tax Review. “*Mengintip Amandemen UU Pajak*”. Volume VII/ Edisi 05. 2007
- Mardiasmo. (2002 : 100). *Perpajakan*.Yogyakarta, Andi.
- Mardiasmo. (2011), *perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.
- Margono. (2010). *Metodolgi Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Nugroho I, Dahuri, R(2004). *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta : LP3ES.

- Moleong, L.J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Regina Usman (2016), Jurnal. “*Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015)*”.
- Suandy, Erly. (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung. Alfabeta.
- Siahaan. Marihot.P. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Edisi revisi-cet. 2. Jakarta. PT Grafindo Persada.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Marsyahrul, Tony. 2006. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Sekaran, Uma. 2010. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- BadanPusatStatistik.2019.*Kota Cilegon Dalam Angka*.Kota Cilegon:Badan PusatStatistik Kota Cilegon
- Kumpulan Peraturan Daerah Kota Cilegon Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB*. 2010. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 2000*. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2000. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.